



# Peran Islam dalam Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Melalui Bantuan Kemanusiaan Internasional Badan Amil Zakat Nasional

Andi Purwono<sup>1</sup>, Yayuk Anggraini<sup>2</sup>

## Abstract

*The role of Islam in foreign policy continues to be a fascinating subject of study in academic discourse. Several studies have shown that Islam's involvement in foreign policy is not always explicitly expressed but is instead mediated by other values such as human solidarity, justice, and universal principles. However, other studies argue that Islam plays a significant role in political life, including in the formulation and implementation of foreign policy, particularly in countries with a Muslim majority. This article aims to describe the role of Islam in Indonesian foreign policy, emphasizing the implementation aspect. Unlike previous studies, which generally focus on the formulation or influence of policy, this study examines how foreign policy is implemented, the responses and impacts it generates. This research uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques consisting of documentation from secondary sources and interviews. The research findings show that Islamic institutions, particularly Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) managed by the National Zakat Agency of the Republic of Indonesia, play a significant role in the implementation of Indonesian foreign policy through the distribution of humanitarian aid to earthquake victims in Turkey and the Palestinian community in the context of the Palestine–Israel conflict. These findings reinforce the view that Islam plays a role in foreign policy not only at the policy input stage, through support and demands, but also significantly at the implementation stage of foreign policy.*

## Keywords

Foreign Policy Implementation; Humanitarian Aid; Islam; Baznas

## Abstrak

*Peran Islam dalam politik luar negeri terus menjadi objek kajian yang menarik dalam diskursus akademik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Islam dalam politik luar negeri tidak selalu tampil secara eksplisit, melainkan dimediasi oleh nilai-nilai lain seperti solidaritas kemanusiaan, keadilan, dan prinsip-prinsip universal. Namun demikian, penelitian lain berpendapat bahwa Islam memiliki peran*

<sup>1</sup> Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

## Corresponding Author:

Andi Purwono, Universitas Wahid Hasyim, Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia ✉ [andipurwono@unwahas.ac.id](mailto:andipurwono@unwahas.ac.id)



signifikan dalam kehidupan politik, termasuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada tahap perumusan atau pengaruh kebijakan, studi ini menelaah bagaimana kebijakan luar negeri dilaksanakan serta bagaimana respons dan dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dari sumber sekunder dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa institusi Islam, khususnya Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia melalui penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Turki serta masyarakat Palestina dalam konteks konflik Palestina–Israel. Temuan ini memperkuat pandangan yang menyatakan bahwa Islam berperan dalam politik luar negeri tidak hanya pada tahap input kebijakan, melalui dukungan dan tuntutan, tetapi juga secara nyata pada tahap implementasi kebijakan luar negeri.

### Kata Kunci

Implementasi Kebijakan Luar Negeri; Bantuan Kemanusiaan; Islam; Baznas

### Article history

Received 15 July 2025

Revised 2 December 2025

Accepted 4 December 2025

Published 17 December 2025

### Cite this article

Purwono, A., & Anggraini, Y. (2025). Peran Islam dalam Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Melalui Bantuan Kemanusiaan Internasional Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Politik Profetik*, 13(2), 189-204. <https://doi.org/10.24252/profetik.v13i2a5>

### Pendahuluan

Banyak peneliti mendiskusikan perihal apakah Islam berperan dalam politik luar negeri. Seperti dalam buku *Islam and Foreign Policy*, tidak hanya di negara Islam, kajian itu juga dilakukan di negara berpenduduk mayoritas Muslim dan bahkan di negara nasionalis lain (Dawisha, 1983). Di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, ada asumsi bahwa Islam besar pengaruhnya terhadap kebijakan.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang moderat (Purwono, 2020), Islam diasumsikan memiliki peran yang besar dalam kehidupan politik termasuk kebijakan luar negeri Indonesia (Wirajuda, 2014). Di awal sejarah republik, Islam dinilai telah memainkan peran penting dalam diplomasi kemerdekaan Indonesia (Hassan, 1980; Rahman, 2007). Para mahasiswa Indonesia yang belajar Islam di negara-negara Timur Tengah dicatat berkontribusi besar dalam mencari dukungan internasional bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka melakukan hal itu melalui kedekatan dan solidaritas keislaman.

Pada tahap perkembangan berikutnya, Islam dinilai absen dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia di era Soekarno dan Soeharto sangat berhati-hati agar politik luar negerinya tidak dikendalikan oleh pertimbangan Islam. Faktor Islam dihindari untuk menjadi ekspresi formal politik luar negeri Indonesia. Menurut

peneliti terdahulu seperti Leifer (1997), ada upaya sengaja untuk tidak melibatkan Indonesia dalam urusan internasional yang bisa memberi dorongan terhadap ambisi politik golongan Muslim di tanah air. Hal yang sama dinyatakan oleh Leo Suryadinata (1998), Azyumardi Azra (2000), Banyu Perwita (2007), Rizal Sukma (2004), Dewi Fortuna Anwar (2011), dan Wahyu Wicaksana (2012). Peran kelompok Islam dalam politik luar negeri juga tidak ada. Dengan demikian era Orde Lama dan Orde Baru lebih menonjolkan karakter konfrontatif, melihat Islam sebagai ancaman, menghindari pertimbangan dan peran Islam, serta menghindari faktor Islam sebagai ekspresi resmi dalam politik luar negeri.

Bagaimana peran Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia? Fox dan Sandler (2004) menyebut bahwa ada empat pengaruh dasar agama dalam hubungan internasional. Pertama, agama dipandang sebagai aspek identitas (*aspect of identity*). Kedua, agama bisa mempengaruhi pandangan dunia (*worldview*) individu dan kelompok yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola pikir dan perilakunya. Ketiga, agama adalah sumber legitimasi (*source of legitimacy*) untuk mendukung maupun mengkritisi pembuat kebijakan. Keempat, agama diasosiasikan dengan institusi-institusi formal yang bisa mempengaruhi proses politik. Dalam beberapa kasus institusi-institusi ini adalah aktor internasional.

Artikel ini berargumen bahwa institusi Islam yaitu zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turut berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Indonesia terutama di ranah implementasi kebijakan. Ketika pemimpin negara membuat keputusan memberikan dukungan kepada aktor di luar negeri yang membutuhkan, Baznas berperan melaksanakan keputusan tersebut. Kontribusi Baznas tersebut berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia.

Artikel ini memiliki arti penting setidaknya karena dua alasan berikut. Pertama, kajian mengenai peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia telah berkembang dengan beragam pendekatan dan temuan. Sejumlah penelitian awal cenderung menempatkan Islam sebagai faktor marginal dengan menekankan dominasi kepentingan nasional material, karakter kepemimpinan, serta identitas negara sekuler dalam menentukan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia (Azra, 2000; Anwar, 2010). Pendekatan ini umumnya menghasilkan kesimpulan bahwa Islam tidak berperan signifikan atau hanya berfungsi sebagai simbol normatif dalam politik luar negeri. Namun, kajian yang lebih mutakhir mulai menunjukkan pergeseran perspektif dengan menempatkan Islam sebagai variabel yang memiliki pengaruh nyata, baik melalui konstruksi identitas Islam moderat, dinamika politik Islam domestik, maupun peran aktor-aktor keagamaan dalam proses kebijakan luar negeri (Umar, 2016; Nugraha, 2012; Hamonangan & Fahd, 2020).

Kedua, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada level wacana, orientasi kebijakan, atau pengaruh politik domestik terhadap formulasi kebijakan luar negeri, sehingga belum secara memadai mengulas bagaimana Islam beroperasi pada tahap implementasi kebijakan. Studi-studi terbaru yang mengaitkan identitas Islam dengan kebijakan luar negeri era pemerintahan Joko Widodo (Damayanti & Al Hasan, 2024; Sarjito, 2023) telah memperkaya diskursus, tetapi tetap menyisakan

celah analitis terkait mekanisme konkret pelaksanaan kebijakan di area pengaruh, pembuatan, hingga implementasi kebijakan luar negeri.

## Metode

Artikel ini dihasilkan dari riset deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi berbagai sumber sekunder serta wawancara dengan Ketua Baznas RI. Data yang ditemukan dianalisis secara kualitatif. Langkah analisa datanya antara lain reduksi data sebagai bentuk penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang dirasa tidak diperlukan sedemikian rupa, sehingga data tersebut dapat menghasilkan sebuah informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya adalah display data atau penyajian data yang merupakan kegiatan saat adanya sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat memberikan sebuah kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), atriaks, grafik, jaringan maupun sebuah bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dengan pola hubungan, sehingga nantinya akan semakin muda dipahami. Langkah terakhir adalah penarikan sebuah kesimpulan dan memverifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat reduksi data tetap pada tujuan analisis yang hendak dipakai. Tahap ini memiliki tujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## Pembahasan

### *Dinamika Kebijakan Luar Negeri Indonesia dari Masa ke Masa*

Kebijakan luar negeri Indonesia telah banyak diteliti para ahli, ada yang meneliti dengan pendekatan periodisasi. Sebagian yang lain meneliti berdasarkan isu tertentu seperti hak asasi manusia, perlindungan warga negara, terorisme, dan lainnya. Di Era Presiden Soekarno, kebijakan luar negeri ditandai dengan kuatnya faktor material berupa dimensi politik keamanan. Upaya mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan dan independensi menjadi tema-tema penting. Antikolonialisme dan antiimperialisme mendominasi retorika dan tindakan presiden pertama (Wuryandari, 2008).

Kebijakan luar negeri di Era Soeharto ditandai dengan kuatnya dimensi ekonomi pembangunan. Kenaikan Soeharto menandai perubahan mendasar pada kebijakan luar negeri Indonesia, yang menjadi lebih berorientasi pada mendukung pembangunan ekonomi (Weinstein, 1971). Soeharto mengambil lebih banyak pendekatan pragmatis terhadap kebijakan luar negeri dibanding pendahulunya. Kebijakan-nya ditandai dengan hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Barat yang

mendapat bantuannya (Sukma, 2004). Untuk memenuhi prioritas ekonominya, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, memperbaiki hubungan normal dengan Malaysia, dan mensponsori pembentukan ASEAN. Dalam pandangan Soeharto, keamanan dalam negeri dan regional dan stabilitas politik sangat penting bagi promosi pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, Soeharto lebih menitikberatkan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, serta membendung sebaran pengaruh komunisme (Wuryandari, 2008).

Kedua era awal pemerintahan Indonesia tersebut menunjukkan dominasi kepentingan material dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Weinstein (1972) menyebut tiga kegunaan prinsipil dari politik luar negeri Indonesia era itu yaitu mempertahankan independensi dari ancaman luar, mobilisasi sumberdaya eksternal untuk pembangunan ekonomi, dan mencari beberapa manfaat bagi kompetisi domestik. Berbeda dengan dua era awal tersebut, perubahan terlihat di era Reformasi. Jika sebelumnya penyebutan dan pertimbangan faktor Islam dihindari, pemerintahan di era Reformasi justru menyebut Islam moderat dalam pernyataan resmi politik luar negerinya, sekaligus menjadi agenda kebijakan luar negeri Indonesia.

Dinamika ini sangat menarik karena Islam moderat sebenarnya sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak kehadirannya di Indonesia, Islam telah menampilkan wajah moderatnya dan kemudian secara terus-menerus *embedded* dalam kehidupan Muslim Indonesia. Secara kultural telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya mayoritas Muslim Indonesia. Secara institusional, Islam moderat juga terlembaga dalam organisasi-organisasi Islam besar. Namun kemunculannya dalam agenda kebijakan luar negeri Indonesia baru terlihat di era Reformasi.

Kehadiran Islam moderat misalnya terlihat dari dokumen dan pernyataan resmi para diplomat Indonesia (Djalal, 2008). Misalnya, pada awal tahun 2005, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyebut bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kepentingan untuk menampilkan wajah Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang *rahmatan lil 'alamiin*, dan Islam moderat merupakan aset politik luar negeri Indonesia yang sangat kuat (BPPK Deplu, 2005). Penggunaan terminologi Islam moderat itu kemudian diteruskan oleh menteri luar negeri penggantinya baik Marty Natalegawa (Anwar, 2011b) maupun Retno P. Marsudi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyebut Islam bersama demokrasi sebagai elemen baru kebijakan luar negeri. Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesian Council on World Affairs (ICWA) tanggal 19 Mei 2005 di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut identitas keislaman menjadi proyeksi yang inheren dalam referensi mengenai bangsa Indonesia (Yudhoyono, 2005). Islam, demokrasi dan modernitas bisa berjalan beriringan di Indonesia.

Bahkan beberapa pengamat menyebut sejak era Presiden Abdurrahman Wahid, entitas Islam sudah mulai masuk dalam politik luar negeri. Tipe Islam yang dibawa oleh Gus Dur itu disebut Islam moderat (Barton, 2002). Inilah norma baru di dalam

kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagai contoh Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menyebut bahwa ide pembukaan hubungan dengan Israel bertujuan untuk membuat Indonesia diakui sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar yang moderat meski dipimpin oleh tokoh agama (Shihab & Wahid, 1999). Hal tersebut dilanjutkan oleh Megawati Soekarnoputri dalam kebijakan anti terorisme dan dengan memberikan dukungan terhadap upaya pembentukan The International Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang merupakan komunitas epistemik yang mengusung gerakan perdamaian dunia berbasis Islam moderat.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agenda Islam moderat semakin tampak nyata dalam kebijakan luar negerinya. Upaya-upaya *empowering the moderates* menonjol termasuk aktivisme dalam turut serta menciptakan perdamaian dunia melalui program fasilitasi *interfaith dialogues*, *inter-civilization dialogues*, dan menjadi tuan rumah beberapa konferensi yang berupaya mempromosikan aspek moderat peradaban Islam, yang diorganisasikan di bawah supervisi Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Tim Kementerian Luar Negeri RI, 2008). Selain itu, langkah nyata juga dilakukan dalam merespon problem Dunia Islam. Hampir semua problem di Dunia Islam tidak luput dari perhatian Indonesia (Shoelhi, 2009), seperti konflik Palestina, persoalan hubungan Sunni dan Syiah di Irak, konflik di Thailand Selatan, dan Libanon. Perhatian itu kemudian diwujudkan dalam berbagai kebijakan penanganan dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda.

Di era Presiden Joko Widodo, hal-hal tersebut terus berlanjut, termasuk dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai pusat studi dan penyebaran Islam moderat bagi dunia. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah berdiam diri terhadap persoalan-persoalan umat Muslim di berbagai negara (Bisnis.com., 2017). Beberapa agenda kebijakan dan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Islam moderat hadir dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era Reformasi.

### **Islam di Ranah Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Kebijakan luar negeri bisa dianalisis di tiga area analisa (*area of analysis*). Ketiganya meliputi: analisa pengaruh- pengaruh yang mendasari politik luar negeri (*influences of foreign policy*); analisa pembuatan politik luar negeri (*making of foreign policy*); dan penerapan kebijakan luar negeri (*implementation of foreign policy*). Beberapa penulis lain menggunakan terminologi berbeda untuk mengkonseptualisasikan ketiga area analisa itu (Dawisha, 1983).

Berbeda dengan di era Orde Lama dan Orde Baru, kebijakan luar negeri Indonesia di era Reformasi dengan tegas menunjukkan identitas Islam moderat dalam hubungan internasional. Bukan hanya penyebutan, Indonesia bahkan kemudian terus berupaya memasukkan Islam moderat sebagai agenda kebijakan luar negerinya dalam politik global (Sukma, 2012). Indonesia berusaha membuat kebijakan yang menunjukkan diri sebagai negara berpenduduk Muslim yang baik dan aktif (*good and active*).

Hal pertama yang dilakukan antara lain upaya menunjukkan Islam Indonesia sesungguhnya yang moderat, menghargai keberagaman, dan anti terorisme. Berbagai program *interfaith dialogues* secara bilateral dan multilateral dilakukan pemerintah. Sebagai contoh adalah dialog lintas agama sejak tahun 2004 melalui forum Asia-Europe Meeting (ASEM) yang diorganisasikan di bawah supervisi Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Tim Kementerian Luar Negeri RI, 2008). Kegiatan dilanjutkan secara berkala, yaitu Interfaith Dialogue and Cooperation di Manila pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 di New Zealand. Dialog regional yang ketiga telah diselenggarakan di Waitangi, Selandia Baru, pada tanggal 29-31 Mei 2007, yang menghasilkan *Waitangi Declaration and Plan of Action*, dan Phnom Penh Dialogue 2008 di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 3-6 April 2008.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa rangkaian *interfaith dialogue* secara bilateral dengan beberapa negara seperti Vatikan pada 30 September 2005 dan 14-15 November 2007. Dengan Belanda, kegiatan tersebut diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 28 Februari-1 Maret 2006, dan 2 Juni 2008. Dengan Kanada, kegiatan itu diselenggarakan di Ottawa pada tanggal 23-24 Oktober 2007. Dengan Inggris, kegiatan tersebut diselenggarakan dalam skema Indonesia-UK Islamic Advisory Group (IUIAG) yang diluncurkan pada tanggal 29-31 Januari 2007 di London. Pertemuan kedua IUIAG dilakukan di Jakarta pada tanggal 12-15 Juni 2007. Selanjutnya dilakukan *interfaith exchange* antara tokoh lintas agama kedua negara di Inggris pada tanggal 28 Oktober-4 November 2007 dan di Indonesia pada tanggal 18-24 Februari 2008.

Pada tingkat global, Indonesia berpartisipasi aktif dalam The Non-Aligned Movement on Interfaith Dialogue and Cooperation, Manila 2010, serta UN Global Forum for Alliance of Civilizations (UNAOC) di Madrid 2008, Istanbul 2009, Rio de Janeiro 2010, Doha 2011, dan Wina 2013. Indonesia pada tahun 2014 menjadi tuan rumah the 6th UN Global Forum for UNAOC.

Hal kedua yang dilakukan adalah aktifitas internasional dalam menunjukkan Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yang aktif upaya inisiasi perdamaian. Indonesia terlihat berusaha menjadi jembatan penghubung antara dunia Islam dan Barat seperti program intermedia dialogue. Selain itu Indonesia berupaya turut aktif menyelesaikan konflik dan problem-problem dunia terutama di *Moslem World*.

Dalam kaitan itu, artikel ini menunjukkan bahwa salah satu institusi Islam Indonesia berperan penting dalam pelaksanaan program kebijakan luar negeri Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan internasional kepada korban bencana gempa bumi di Turki tahun 2023 dan kepada warga Palestina. Ini sejalan dengan tulisan Fox dan Sandler (2004), bahwa agama berperan/ berpengaruh penting dalam politik sebagai sumber *worldview*, identitas, legitimasi, dan melalui institusi agama.

Baznas memiliki program yang ditujukan untuk mengantisipasi darurat kemanusiaan yaitu Program Tanggap Bencana. Program Tanggap Bencana adalah program merespon untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. Program Tanggap Bencana meliputi tanggap

darurat, evakuasi, *recovery*, dan rekonstruksi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana dilakukan maksimal 14 hari. Ini dilakukan bagi bencana di dalam negeri maupun luar negeri.

### **Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Gempa Turki**

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI memberi bantuan kemanusiaan internasional ke Turki. Bantuan ini ditujukan kepada korban gempa di Turki pada hari Rabu 15 Februari 2023. Sumbangan bantuan yang diberikan berupa 2.000 paket sembako, 2.000 paket kebersihan diri dan 500 paket perlengkapan musim dingin, disalurkan ke daerah yang paling terkena dampak, dengan rincian 50 paket di camp pengungsi Seyhan provinsi Adana, 150 parsel di Nurdagi Provinsi Gaziantep, 300 paket di Hassa, dan 1.500 parsel di Antakya Provinsi Hatay.

Bantuan Indonesia meliputi paket makanan, paket kesehatan dan kebersihan, juga perlengkapan musim dingin seperti selimut, kaos kaki dan syal. Cuaca dingin saat bencana memang semakin memperburuk keadaan para pengungsi korban gempa dengan suhu berkisar antara -3 derajat celcius sampai -5 derajat celcius (Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Anggota Baznas yang diterjunkan antara lain Ahmad Fikri, Budi Margono, Taufik Hidayat dan Reza Ramdhoni.

Bantuan dilakukan dengan langkah pertama persiapan yaitu melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Turki. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memang memberi amanat agar Baznas memberi bantuan kemanusiaan ke Turki. Ma'ruf Amin juga menyatakan Baznas Tanggap Bencana (BTB) terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan ikut rapat persiapan atas arahan Ma'ruf Amin (Republika.co.id., 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membuat kebijakan luar negeri pemberian bantuan kemanusiaan dan kemudian Baznas melaksanakannya.

Langkah kedua Baznas menyiapkan dana Rp. 1 miliar yang dikhususkan untuk bantuan tanggap bencana seperti logistik, makanan, obat-obatan, dan juga untuk pengiriman. Langkah ketiga Baznas melakukan penggalangan dana kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Baznas juga mengajak seluruh Baznas provinsi dan kabupaten serta kalangan perusahaan untuk menggalang dana selama satu bulan. Langkah keempat, Baznas mengajak unit-unit pengumpul zakat Baznas di kantor-kantor BUMN, kementerian/lembaga, TNI dan Polri untuk menghimpun dana kemanusiaan pada program solidaritas dunia Islam.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa peran Baznas dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah, terutama melalui instruksi Ma'ruf Amin yang secara khusus ditugasi Presiden Joko Widodo untuk menangani hal tersebut. Bahkan menurut keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki, pemerintah Indonesia di bawah koordinasi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Kementerian Luar Negeri menerjunkan Tim Medium Urban Search and Rescue BASARNAS, Tim Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, TNI dan Polri serta bantuan lainnya yang sedang diidentifikasi sesuai kebutuhan (Tempo.co., 2023).



Proses pengiriman bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki sendiri dilakukan dalam tiga tahap yakni, logistik, tim medis dan uang tunai. Tahapan pertama, Middle Urban Search and Rescue Team (MUSAR) dipimpin Menko PMK Muhajir Efendy, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Bandara Halim Perdana Kusuma. Basarnas sebanyak 47 orang personel beserta peralatan lengkap dan juga didampingi oleh tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Tahap pertama ini diberangkatkan pada tanggal 11 Februari 2023.

Untuk tahap kedua, bantuan Emergency Medical Team EMT yang dikirimkan sebanyak 105 personel, lengkap beserta obat-obatan termasuk peralatan rumah sakit lapangan yang akan diperlukan apabila akan dilakukannya operasi darurat di lokasi bencana gempa. Untuk tahapan ketiga yakni logistik dan peralatan serta bantuan lainnya (Liputan6.com., 2023).

### ***Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Palestina***

Terhadap konflik Palestina- Israel, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang konsisten. Sejak awal negara berdiri, Indonesia telah mengadopsi politik luar negeri tidak mengakui Israel dan sebaliknya membuat kebijakan mendukung perjuangan Palestina. Kebijakan ini merefleksikan nasionalisme negara Dunia Ketiga, alasan kemanusiaan, hingga solidaritas keagamaan.

Sebagai gambaran, Presiden Soekarno membela Palestina dengan pendekatan konfrontatif terhadap Israel. Indonesia bahkan menolak kehadiran Israel yang disebutnya sebagai representasi imperialis dalam Asian Games IV tahun 1962. Bahkan atas alasan anti imperialisme dan kolonialisme, Soekarno membentuk olimpiade pertandingan bernama Games of New Emerging Forces (Ganefo).

Presiden Soeharto juga terus membantu perjuangan Palestina. Dukungan Indonesia terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Yasser Arafat dan diakui PBB sebagai wakil sah rakyat Palestina dilakukan. Soeharto juga mengundang Arafat yang hadir ke Jakarta pada awal November 1993. Namun secara mengejutkan, Soeharto menerima kehadiran Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada 15 September 1993. Banyak kritik bermunculan menyesalkan pertemuan karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun Soeharto menyatakan pertemuannya dalam kapasitas sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok.

Di awal era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid muncul pula wacana membuka hubungan dagang dengan Israel. Menurut Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, hal itu didorong alasan politis agar Indonesia bisa lebih berperan mendamaikan konflik Palestina-Israel. Selain itu ada alasan dukungan investasi dan pemulihan ekonomi nasional terkait kekuatan personal dan lobby Yahudi di berbagai lembaga keuangan internasional.

Meski demikian, wacana itu dibatalkan seiring desakan politik dalam negeri sehingga para kiai NU memberi nasihat kepada Gus Dur untuk membatalkan rencana tersebut. Di era Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi, konsistensi dukungan pada perjuangan Palestina diteruskan.

Di ranah pelaksanaan, Indonesia juga memberikan bantuan kepada Palestina seperti *capacity building* hingga aksi kemanusiaan. Melalui organisasi pemerintah non-struktural yaitu Baznas, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan yang layak untuk korban agresi Israel ke Palestina. Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, turut aktif dalam memberikan bantuan pada korban agresi Israel ke Palestina yang terus terulang kembali (Badan Amil Zakat Nasional, 2024). Peran aktif Baznas dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina tercatat sejak tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membuat kebijakan luar negeri pemberian bantuan kemanusiaan dan kemudian Baznas melaksanakannya.

Saat terjadinya agresi Israel ke Palestina pada akhir tahun 2008 hingga menjatuhkan banyak korban jiwa, Indonesia mengambil jalan bijak dalam menanggapi peristiwa tersebut. Baznas memberikan bantuan sebesar Rp. 5,2 miliar untuk rakyat Palestina. Dana tersebut merupakan hasil penggalangan dana Baznas serta Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISP), dan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) yang diperuntukkan membeli obat-obatan dan pembangunan infrastruktur yang telah hancur akibat agresi Israel ke Palestina.

Pada tahun 2012, terjadi agresi yang dilakukan Israel dengan menyerbu Gaza. Meski pada tahun itu Baznas sedang memasuki masa transisi dengan adanya perubahan regulasi tentang pemilihan pengurus, namun tugas untuk menghimpun dana zakat tetap dilakukan bahkan meningkat 26% dibanding tahun 2011. Peningkatan dana yang dihimpun, Baznas melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan Baznas merupakan hasil menghimpun dana rakyat Indonesia. Pengiriman bantuan kemanusiaan tidak hanya berupa barang yang layak pakai, melainkan Baznas juga mengirimkan relawan dari Indonesia yang memiliki mitra dengan Baznas. Relawan yang dikirimkan oleh Baznas merupakan relawan yang ditugaskan untuk ikut membantu rakyat Palestina untuk diamankan dan diberi pelayanan pengobatan yang berada di Rumah Sakit Indonesia di Palestina (Kementerian Luar Negeri RI, 2020).

Hal yang sama dilakukan Baznas pada tahun 2014. Baznas melakukan penggalangan dana. Baznas juga menerima sumbangan dana dari Baznas daerah yang kemudian disumbangkan kepada warga Palestina yang terdampak akibat agresi yang dilakukan Israel. Pada tahun 2021, di masa transisi pasca pandemi Covid-19 agresi yang dilakukan oleh Israel kembali terjadi. Baznas mengajak seluruh lembaga zakat yang ada di dunia untuk ikut membantu krisis kemanusiaan yang diderita rakyat Palestina. Bahkan hingga mendekati momentum Idul Fitri, konflik yang dialami Palestina tak kunjung reda. Atas kesadaran norma kemanusiaan, Baznas RI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut membantu. Dari bantuan yang terkumpul dari masyarakat Indonesia dan menjalin kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, bantuan berupa pangan diserahkan kepada masyarakat Palestina terutama yang berada pada sekitaran Masjid Al-Aqsa (Badan Amil Zakat Nasional, 2021).

Baznas yang memiliki jejaring kelembagaan hingga ke kabupaten/ kota membuka penggalangan dana hingga terkumpul mencapai Rp. 1,8 miliar hingga pertengahan tahun 2021 dan diperkirakan menyentuh nilai Rp. 3 miliar. Bahkan Baznas juga menyalurkan *Humanity Voucher* yang dapat dipergunakan untuk membeli barang kebutuhan seperti bahan sandang, pangan, hingga papan.

Pada tahun 2023, setelah merasakan ketenangan yang tidak begitu lama, rakyat Palestina kembali diserang oleh Israel pada 7 Oktober 2023 di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Atas terjadinya konflik yang dialami Palestina, melalui Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) memberi laporan bahwa terdapat korban jiwa yang tewas mencapai 13.216 jiwa dan mengalami luka mencapai 32.750 jiwa. Untuk perincian korban jiwanya, tercatat sebanyak 13.000 korban jiwa meninggal di Jalur Gaza, sebanyak 216 korban jiwa di Tepi Barat, dan 6.000 jiwa dinyatakan hilang tidak ditemukan akibat tertimpa runtuhnya bangunan.

Atas konflik yang berkelanjutan dan menyebabkan Palestina merasakan kepedihan, Indonesia berperan aktif melalui Baznas dengan mengirimkan bantuan untuk Palestina. Bahkan Baznas membentuk ikatan kerjasama dengan lembaga filantropi Mesir, Mishr Al-Kheir untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina sebuah truk kontainer sebanyak 6 buah yang dikirimkan melalui pintu Rafah Mesir.

Baznas juga mengajak seluruh komponen rakyat Indonesia untuk ikut membantu dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Baznas dengan Tentara Nasional Indonesia khususnya Angkatan Laut juga mengirimkan 60 Ton bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang dikirimkan melalui jalur laut menggunakan kapal Rumah Sakit TNI KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992.

### **Motivasi Kemanusiaan**

Apa yang mendorong pengiriman bantuan kemanusiaan internasional tersebut? Norma kemanusiaan merupakan alasannya. Prinsip kemanusiaan merupakan komitmen paling dasar dari aksi kemanusiaan yang dilakukan para aktor dalam aksi kemanusiaan (Barnett, & Weiss, 2008).

Sebagai lembaga amil zakat, Baznas selalu mendasarkan kegiatannya pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Dalam kaitan itu, dasar rujukan yang biasa dijadikan pedoman adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Meminjam konsepsi Fox dan Sandler tentang pengaruh agama dalam politik, fatwa ini bisa kita pandang sebagai sumber cara pandang dunia/ worldview sekaligus sumber legitimasi.

Alasan keagamaan pada bantuan kemanusiaan internasional ini misalnya disandarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang 'Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya'. Poin penting dari fatwa ini adalah bahwa harta zakat boleh dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana dengan tetap berpedoman pada ketentuan terkait.

Berkenaan dengan bantuan kemanusiaan Baznas ke Palestina, yang menjadi landasan adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina pada 8 November 2023 M/ 24 Robiul Akhir 1445 H. Di bagian pertama tentang ketentuan hukum, fatwa menyebut

bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Dukungan tersebut diwujudkan termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

Pada dasarnya, dana zakat harus didistribusikan kepada *mustahik* (penerima zakat) yang berada di lokasi sekitar *muzakki* (pemberi zakat). Dalam keadaan darurat dan mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke *mustahik* yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Di bagian pertimbangan dikutip ayat tentang Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang seperti Al Quran Surat at Taubah 48. Juga dikutip Hadis tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia.

Fatwa juga memperhatikan pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada *mustahik* yang berada di tempat jauh, antara lain Pendapat al-Sayyid al-Bakri dalam kitab l'anatu al-Thalibin serta pendapat Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaith dalam kitab al-Taqrirat al-Sadidat yang terbitkan Darul Mirath Nabawi. Zain menyebut bahwa Imam Ibn 'Ujail berkata: Ada tiga masalah yang difatwakan dalam pendapat yang tidak populer (*ghair al-masyhur*) dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu di antaranya adalah kebolehan membagikan zakat pada satu golongan saja, kebolehan membayar zakat satu persatu, kebolehan memindahkan zakat dari tempat asalnya ke daerah lainnya.

Alasan kemanusiaan juga terlihat dalam pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan merupakan wujud solidaritas dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Menurutnya, tragedi kemanusiaan tidak dapat diterima dan presiden menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bagi kemerdekaan masyarakat Palestina.

Hasil wawancara penulis dengan Ketua Baznas RI, Noor Achmad, juga menunjukkan alasan kemanusiaan universal ini sebagai pendorong pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Ketua Baznas juga menyatakan bahwa dana ZIS dapat untuk membantu sesama Muslim dan ZIS untuk semua berdasar prinsip kemanusiaan sesuai amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Menurut Noor Achmad, Baznas harus membantu tugas-tugas kemanusiaan keislaman (Achmad, 2023). Alasan lain adalah bahwa aksi kemanusiaan itu didasari kedaruratan (mendesak) dan urgensi untuk menolong jiwa manusia yang membutuhkan sebagaimana salah satu *maqashidus syariah* yaitu *hifzhun nafs*.

Bahkan Ketua Baznas menargetkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina menembus nilai Rp. 250 miliar. Baznas juga mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang mengungsi di Yordania, Yerusalem, dan wilayah pengungsian lainnya. Noor Achmad juga menyampaikan pesan bahwa bantuan kemanusiaan dari Indonesia dapat meringankan permasalahan yang sedang dirasakan warga Palestina. Pada masa seperti ini merupakan masa yang tepat untuk meningkatkan bantuan untuk Palestina. Dalam hal ini, Baznas akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dan dunia agar terus mendorong konflik Israel-Palestina diselesaikan dengan ketentuan yang telah disetujui bersama.

## Kesimpulan

Dalam kancah diplomasi Asia Tenggara, Indonesia telah membangun citra tertentu. Paparan di atas dapat disimpulkan dalam dua hal berikut. Pertama, Islam berperan penting dalam implementasi kebijakan luar negeri Indonesia. Bantuan kemanusiaan ke Turki dan Palestina menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan luar negeri berupa pemberian bantuan kemanusiaan, kemudian BAZNAS melaksanakannya. Peran BAZNAS RI dalam kedua kasus tersebut membuat kebijakan luar negeri Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Kedua, terdapat alasan kemanusiaan yang kuat yang juga didasari oleh landasan agama, yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bantuan kemanusiaan internasional BAZNAS RI turut berkontribusi positif terhadap politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam menunjukkan identitas Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia yang moderat. Upaya internasional ini memperkuat arus utama Islam Indonesia yang *rahmatan lil 'alamin*.

## Kontribusi Penulis

Andi Purwono: *Writing-original draft, Conceptualization, Methodology.*

Yayuk Anggraini: *Writing-review & editing, Validation.*

## Pernyataan Keaslian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa artikel adalah karya asli penulis, artikel tersebut bebas dari plagiarisme, dan referensi telah dicantumkan semua dalam artikel. Penulis juga menyatakan bahwa artikel belum dipublikasikan dan tidak sedang dikirim ke jurnal lain.

## Biografi

Andi Purwono merupakan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Wahid Hasyim sejak tahun 2001 dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan menulis beberapa artikel jurnal tentang politik luar negeri dan diplomasi selain aktif menulis artikel populer di beberapa Koran seperti Suara Merdeka dan Sindo. Beberapa artikel terakhir antara lain *Diplomacy of Semarang City Government through International Human Rights Festival 2021-2022* bersama: AY Hartati, A Purwono, A Riyanto, AN Adiba di *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 14 (1), 2024 dan *Driving Factors Behind Turkey's Establishment of the Turkey-Russia Joint Center in 2020* bersama Ismiyatun.

Yayuk Anggraini merupakan dosen dan peneliti pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Menempuh

Pendidikan S1 di Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 1998, S2 Kebijakan Publik Universitas Mulawarman tahun 2004 dan S3 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2013. Aktif dalam penelitian yang berfokus pada Isu-Isu Hubungan Internasional, Diplomasi dan Gender. Sejumlah karya akademik telah dipublikasikan melalui buku maupun jurnal ilmiah. Publikasi terbaru berjudul Navigasi Baru Diplomasi Indonesia: Analisis Perubahan Politik Luar Negeri Pasca Pemindahan Ibu Kota.

## Referensi

- Anwar, D. F. (2011a). Foreign policy, Islam and democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 3, 37-54.
- Anwar, D. F. (2011b). The Impact of Domestic Politics and Asian Regional Affairs on Indonesian Foreign Policy. *Southeast Asian Affairs*, 126-142.
- Azra, A. (2000). Islam in Indonesian Foreign Policy: Assessing Impacts of Islamic Revivalism during the Soeharto Era. *Studia Islamika*, 7(3), 1-29.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021.). BAZNAS ajak lembaga zakat sedunia bantu perjuangan rakyat Palestina. [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_Ajak\\_Lembaga\\_Zakat\\_Sedunia\\_Bantu\\_Perjuangan\\_Rakyat\\_Palestina/803](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Lembaga_Zakat_Sedunia_Bantu_Perjuangan_Rakyat_Palestina/803)
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). BAZNAS salurkan ribuan makanan dan paket kebersihan diri untuk korban gempa Turki. [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_Salurkan\\_Ribuan\\_Makanan\\_dan\\_Paket\\_Kebersihan\\_Diri\\_untuk\\_Korban\\_Gempa\\_Turki/1378](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Salurkan_Ribuan_Makanan_dan_Paket_Kebersihan_Diri_untuk_Korban_Gempa_Turki/1378)
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). Bantuan kemanusiaan BAZNAS telah masuk ke Gaza, Palestina. [https://baznas.go.id/news-show/Bantuan\\_Kemanusiaan\\_BAZNAS\\_%C2%Aotelah\\_Masuk\\_ke\\_Gaza,\\_Palestina/1741](https://baznas.go.id/news-show/Bantuan_Kemanusiaan_BAZNAS_%C2%Aotelah_Masuk_ke_Gaza,_Palestina/1741)
- Barnett, M., & Weiss, T. G. (Eds.). (2008). *Humanitarianism in question: Politics, power, ethics*. Cornell University Press.
- Barton, G. (2002). *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*. University of Hawaii Press.
- Bisnis.com. (2017). Jokowi: Indonesia aktif dalam membantu persoalan umat Islam dunia. <https://kabar24.bisnis.com/read/20170917/15/690611/jokowi-indonesia-aktif-dalam-membantu-persoalan-umat-islam-dunia>
- BPPK Deplu. (2005). *Himpunan Pidato/ Sambutan Menteri Luar Negeri Tahun 2004*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Damayanti, A., & Al Hasan, M. (2024). The role of Islam in the Indonesian foreign policy in the era of Joko Widodo's government (2014–2024): Between Islamic identity and national interests. *Jurnal Indo-Islamika*, 14(1), 1–15.
- Dawisha, A. (1983). *Islam in foreign policy*. Cambridge University Press.
- Djalal, D. P. (2008). *Harus Bisa ! Seni Memimpin Ala SBY*. Red & White.

- Fox, J., & Sandler, S. (Eds.). (2004). *Bringing religion into international relations*. Springer.
- Halim, A., Nisrina, A., & Bayurizki, B. (2025). Islam political construction in Indonesia's foreign policy. *FETRIAN Journal of International Relations*, 7(1), 39–68. <https://doi.org/10.25077/fetrian.7.1.39-68.2025>
- Hamonangan, R., & Fahd, M. (2020). Implikasi gerakan politik Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia era presidensi Joko Widodo. *Defendonesia*, 4(2), 1–6. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v4i2.85>
- Hassan, M. Z. (1980). *Diplomasi Revolusi Kemerdekaan Indonesia: Perjuangan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah*. Bulan Bintang.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pejuang kemanusiaan di tengah pandemi di Palestina*. <https://kemlu.go.id/amman/id/news/6476/pejuang-kemanusiaan-di-tengah-pandemi-di-palestina>
- Leifer, M. (1997). *Politik luar negeri Indonesia*. Gramedia.
- Liputan6.com. (2023). 3 tahapan bantuan Indonesia untuk korban gempa Turki: Logistik, tim medis hingga uang tunai. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5204743/3-tahapan-bantuan-indonesia-untuk-korban-gempa-turki-logistik-tim-medis-hingga-uang-tunai>
- Noor Achmad, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Wawancara, Juni 2023.
- Nugraha, A. (2012). Moderate Islam as new identity in Indonesian foreign policy. *Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia*, 1(1), 1–15.
- Perwita, A. A. B. (2007). *Indonesia and the Muslim World: Between Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond*. Nias Press.
- Purwono, A. (2020). Internationalization of Islam Rahmatan Lil'Alamin Through Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (Pcinu): Motivation and Contribution. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 240–257.
- Rahman, S. A. (2007). Diplomasi RI di Mesir dan Negara-negara Arab pada tahun 1947. *Wacana*, 9(2), 154–172.
- Republika.co.id. (2023). *Baznas kerahkan berbagai persiapan bantu penyintas gempa Turki*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rppijd349/baznas-kerahkan-berbagai-persiapan-bantu-penyintas-gempa-turki>
- Sarjito. (2023). Dampak politik Islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. *Jurnal Politik Walisongo*, 5(2), 125–148. <https://doi.org/10.21580/jpw.v5i2.17918>
- Shihab, A., & Wahid, A. (1999). Controversy over Indonesia-Israel Relations. *The Jakarta Post*, 20.
- Shoelhi, M. (2009). *Diplomasi Damai*. Remaja Rosdakarya.
- Sukma, R. (2004). *Islam in Indonesian foreign policy: Domestic weakness and the dilemma of dual identity*. Routledge.
- Sukma, R. (2012). Domestic politics and international posture: Constraints and possibilities. In A. Reid (Ed.), *Indonesia rising: The repositioning of Asia's third giant* (pp. 77–92). ISEAS Publishing.
- Suryadinata, L. (1998). *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. LP3ES.

- Tempo.co. (2023). *Bantuan pertama Indonesia untuk gempa Turki tiba di Gaziantep*. <https://www.tempo.co/internasional/bantuan-pertama-indonesia-untuk-gempa-turki-tiba-di-gaziantep-220717>
- Tim Kementerian Luar Negeri RI. (2008). *Buku Saku Diplomasi Publik*. Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI.
- Tim Kementerian Luar Negeri RI. (2008). *Buku Saku Diplomasi Publik*. Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI.
- Umar, A. R. M. (2016). A genealogy of moderate Islam: Governmentality and discourses of Islam in Indonesia's foreign policy. *Studia Islamika*, 23(3), 399-433.
- Utama, M. R. (2024). Nahdlatul Ulama's strategic role in shaping Indonesian foreign policy. *Muslim Politics Review*, 3(2), 101-123.
- Weatherbee, D. (2013). *Indonesia in ASEAN: Vision and reality*. ISEAS Publishing.
- Weinstein, F. B. (1971). The Indonesian elite's view of the world and the foreign policy of development. *Indonesia*, (12), 97-131.
- Weinstein, F. B. (1972). The uses of foreign policy in Indonesia an approach to the analysis of foreign policy in the less developed countries. *World Politics*, 24(3), 356-381.
- Wicaksana, I. G. W. (2012). *Islam and Indonesia's Foreign Policy, with Special Focus on Jakarta-Islamabad Relations*. (Doctoral dissertation, University of Western Australia).
- Wirajuda, M. (2014). *The impact of democratisation on Indonesia's foreign policy: regional cooperation, promotion of political values, and conflict management* (Doctoral dissertation, London School of Economics and Political Science).
- Wuryandari, G. (2008). *Politik luar negeri Indonesia di tengah pusaran politik domestik*. Pustaka Pelajar.
- Yudhoyono, S. B. (2005). *Transforming Indonesia: selected international speeches with essays by international observers*. Office of Special Staff of the President for International Affairs.